



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	6 (Enam)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI
Hari, Tanggal	:	Senin, 20 Maret 2023
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Faisol Riza/Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai Progress Penanganan Plumpang dan Progress rencana program BUMN Tahun 2023;
Hadir	:	1. Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Bapak Erick Thohir; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada pukul 10. WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 20 Februari 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk melaksanakan penanganan dampak insiden TBBM Plumpang sebagai bagian dari solusi terintegrasi Pertamina termasuk pembangunan *Buffer Zone* Plumpang dalam jangka waktu 3 Bulan.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam kaitan jarak aman antara objek vital nasional perusahaan BUMN dengan pemukiman masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk dokumen AMDAL, penyediaan *green barrier* dan pagar pembatas.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memperbaiki konsistensi pengelolaan aset tanah dan bangunan termasuk melakukan audit, inventarisasi, valuasi dan pengamanan aset dalam objek vital yang ditangani BUMN, antara lain TBBM Plumpang serta objek vital nasional lainnya.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memastikan *timeline*, dan strategi mitigasi risiko perusahaan yang tepat sehingga rencana aksi korporasi perusahaan BUMN pada tahun 2023 dapat tercapai sesuai target.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.50 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MARTIN MANURUNG, SE., MA.,

A-352